

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2010-2011
KE PROVINSI BALI
TANGGAL 8-11 NOVEMBER 2010**

I. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan merupakan tiga fungsi yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga negara. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan melalui 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI. Wujudnya, setiap tahun, Komisi mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Mitra Kerja dan Masyarakat melalui Rapat-rapat di DPR RI maupun Kunjungan Kerja ke Mitra Kerja di setiap Reses Masa Persidangan.

Untuk Kunjungan Kerja ke Mitra Kerja, dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, Komisi I DPR RI yang membawahi bidang pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informatika, melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali. Tujuan utama Kunker adalah mengawasi program pemerintah secara langsung, khususnya yang terkait dengan bidang pertahanan dan intelijen di Provinsi Bali.

Pemilihan Provinsi Bali sebagai tujuan Kunjungan Kerja didasari oleh sejumlah pertimbangan:

Pertama, Provinsi Bali merupakan provinsi strategis dan *icon* Indonesia. Sebagai tujuan wisata internasional, keamanan di Bali menjadi isu penting. Untuk itu, pemerintah harus memprioritaskan sektor keamanan di Provinsi Bali dengan dukungan dari DPR RI.

Kedua, keberadaan sejumlah pulau kecil di Bali antara lain Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan, serta sejumlah pelabuhan di wilayah pinggiran Bali, berpotensi sebagai ancaman masuknya berbagai hal negatif. Karenanya, pengawasan secara dini dan komprehensif merupakan hal penting.

2. Maksud dan Tujuan

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Bali dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi di Provinsi Bali terkait dengan pembangunan bidang pertahanan dan pelaksanaan tugas keamanan oleh Mitra Kerja Komisi I DPR RI, berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya, hasil Kunjungan Kerja ini digunakan sebagai bahan

masuk dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan Rapat-Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2010-2011.

3. Waktu dan Komposisi

Kunjungan Kerja Komisi I DPR ke Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 8-11 November 2010, dengan susunan keanggotaan Tim sebagai berikut:

1. Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita	F-PG	Ketua Tim
2. DR. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, S.H., M.H.	F-PD	Anggota Tim
3. Max Sopacua, S.E., M.Sc.	F-PD	Anggota Tim
4. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.	F-PD	Anggota Tim
5. Mayjen Tni (Purn) Yahya Sacawiria, S.IP., MM.	F-PD	Anggota Tim
6. Mirwan Amir	F-PD	Anggota Tim
7. Yorrays T.H. Raweyai	F-PG	Anggota Tim
8. Ir. Neil Iskandar Daulay	F-PG	Anggota Tim
9. Jeffrie Geovanie	F-PG	Anggota Tim
10. Achmed Zaky Iskandar Zulkarnain, B.Bus	F-PG	Anggota Tim
11. Mahyudin, ST., MM.	F-PG	Anggota Tim
12. Tantowi Yahya	F-PG	Anggota Tim
13. Ir. Dadoes Sumarwanto, M.Arc.	F-PDIP	Anggota Tim
14. Helmy Fauzi	F-PDIP	Anggota Tim
15. Drs. H. Sumaryoto	F-PDIP	Anggota Tim
16. Primus Yustisio	F-PAN	Anggota Tim
17. Dr. H.A. Effendy Choirie, M.H.	F-PKB	Anggota Tim
18. Rachel Maryam Sayidina	F-Gerindra	Anggota Tim
19. Suprihartini, S.IP.		Sekretariat Komisi I DPR RI
20. Anggrek Kurnianti, S.H.		Sekretariat Komisi I DPR RI
21. Dian Arivani S.E.		Pemberitaan DPR RI
22. Nurul Faizah		Staf Ahli Komisi I DPR RI

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pertemuan dengan Kaposwil BIN Bali (Tertutup)

2. Pertemuan dengan Pangdam IX/Udayana

- a. Kodam IX/Udayana sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang melaksanakan tugas pertahanan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Markas Kodam IX/Udayana berada di Denpasar dengan satuan pelaksana terdiri dari :
 - 1). 3 Korem di tiap provinsi
 - 2). 15 Badan Pelaksana Kodam IX/Udayana di Denpasar
 - 3). 1 Rindam IX/Udayana di Tabanan Bali
 - 4). 1 Brigif-21/Komodo di Camplong NTT
 - 5). 1 Deninteldam IX/Udayana di Kuta Bali

- 6). 1 Yonif 900 Raider di Singaraja Bali
 - 7). 1 Denzipur-9 di Gianyar Bali
 - 8). 1 Kikavserdam IX/Udayana di Kuta Bali
- b. Kekuatan Militer Kodam IX/Udaya sebesar 14.005 terdiri dari organik pada awal TA sebesar 13.304 orang dan militerisasi eks korem 164/WD sebesar 701 orang. Sementara kekuatan PNS pada awal TA 2010, sebesar 3.051 orang.
- c. Kondisi Sarana Prasarana
- 1). Transportasi
Sarana transportasi pasukan sangat terbatas. Kondisi ini menjadi kendala bagi pelaksanaan pemindahan pasukan mengingat lokasi satuan yang tersebar. Selain itu, Kodam IX/Udaya belum memiliki sarana transportasi untuk mendukung terselenggaranya komando dan kendali tugas dengan kondisi wilayah kepulauan.
 - 2). Komunikasi
Sarana komunikasi belum dapat mengintegrasikan komunikasi antara Makodam IX/Udayana dengan Satuan jajaran Korem 161/WS di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Satuan Jajaran Korem 162/WB di wilayah Nusa Tenggara Barat.
 - 3). Pangkalan
Kondisi pangkalan baik perkantoran maupun perumahan belum sepenuhnya tersedia, khususnya perumahan/asrama untuk prajurit di satuan kewilayahan dan satuan non tempur, sehingga masih banyak prajurit yang tinggal di luar asrama baik dengan cara mengontrak rumah atau menyewa ruangan. Hal ini berpengaruh terhadap kesiapan operasional.

3. Pertemuan dengan Danlanal Benoa Denpasar

- a. Tupoksi Lanal Denpasar: menyelenggarakan administrasi logistik bagi unsur-unsur TNI AL yang bertugas di Bali, melaksanakan penegakan hukum dan menjaga keamanan laut di wilayah kerja Lanal Denpasar, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (potensi maritim) di wilayah kerja Lanal Denpasar.
- b. Lanal Denpasar mencakup: Posal yakni Nusa Penida (tipe A), Celukan Bawang (Tipe B), Gilimanuk (tipe C), Pengambangan (tipe C) dan syahbandar TNI AL Benoa. Permasalahan yang sering terjadi : tidak ada dukungan alat komunikasi dan BBM. Adapun kerawanan yang terjadi di Posal antara lain: illegal entry, Laka Laut, pengangkutan ikan hidup, lintas BBM ilegal, pelanggaran kepabeanan, lintasan penyeberangan teroris, penyelundupan hewan ternak, tempat labuh/sandar yacht asing.
- c. Kekuatan personel di lingkungan Lanal Benoa Denpasar:

DSP 2009		Riil		Blm terisi
PA	42 orang	PA	26 orang	-16 orang
BA	132 orang	BA	90 orang	-42 orang
TA	85 orang	TA	49 orang	-36 orang

DSP 2009		Riil		Blm terisi
PNS	18 orang	PNS	16 orang	-2 orang
Jumlah	277 orang		181 orang	-96 orang

4. Pertemuan dengan Danlanud Ngurah Rai Bali

- a. Lanud Ngurai Rai merupakan Lanal Pelaksana tipe C yang berada di bawah KOOPSAU II dengan tugas menyiapkan dan melaksanakan bimbingan dan operasi di seluruh satuan dalam jajaran serta BINPOTDIRGA
- b. Gambaran dukungan alutsista di Lanud Ngurah Rai :

Jenis	Keterangan
Pesawat	Nihil
Rudal	Nihil
Radarm	Nihil (menggunakan radar sipil)
Senjata	SS-1, revolver, pistol HPM-46, Pistol L Lama, Pistol P-1 Pindad, Pistol Isyarat, Pistol P2 Pindad
Amunisi	SS-1 5.56 mm 5 TJ, S-1 5.56 mm 5 H, SS-1 5.56 mm 5 DK, Ruby 38 SP 6 TJ, L LAMA 9 MM 1 SP, P-1/P2 9 MM 1 TJ, Peluru Isyarat 1" & Sign Roket

- c. Komposisi Personil di Lanud Ngurah Rai Bali:

Golongan	DSP	RIIL	Kurang
Per8wira	45	41	-4
Bintara	107	86	-21
Tamtama	45	37	-8
PNS	26	19	-7
Jumlah	223	183	-40

- d. Dukungan operasi penerbangan mencakup satu *follow me car*, MCC, *Ground Support equipment*, ruangan operasi, *base rescue/fire guard*.
- e. Potensi ancaman terhadap wilayah udara antara lain: serangan udara langsung oleh pesawat dari negara terdekat (Australia dan Timor Leste), penerjunan pasukan dalam rangka infiltrasi, sabotase terhadap fasilitas bangunan, pesawat asing yang melintas di bandara seperti Porter, penyelundupan, infiltrasi dan lain sebagainya.

III. PERMASALAHAN

1. Poswil BIN Bali (Tertutup)

2. Kodam IX/Udayana

- a. Peningkatan satuan Deninteldam IX/Udayana dari tipe B menjadi tipe A belum dilengkapi dengan jumlah personel, sarana dan prasarana sesuai dengan tipe A.
- b. Belum tersedianya fasilitas berupa lapangan tembak. Sejauh ini, lapangan tembak di Bali berada di Rindam IX/Udayana, sedangkan lapangan tembak di NTB belum memenuhi standar. Sementara itu, di NTT belum memiliki lapangan tembak. Dari ketersediaan senjata ringan masih terbatas jumlahnya, sementara kondisi laras dan galangan sudah aus, khususnya senjata yang dimiliki oleh Satbanmin dan Satbalak. Kompas dan GPS untuk melaksanakan latihan khususnya bagi Satbanpur, Satbanmind dan Satkowil belum ada.
- c. Daerah perbatasan RI-RDTL masih berpotensi terhadap konflik mengingat sejumlah wilayah masih menjadi sengketa bagi masyarakat kedua negara. Yakni Kabupaten Belu (Memo) serta Kabupaten Kupang dan TTU (Bijael Sunan Oben, Noel Besi-Citrana, Subina, Pistana, Maumeniana, Tubu Benat).
- d. Belum adanya pos permanen guna mendukung operasi pengamanan di pulau-pulau kecil terdepan. Selain itu, kondisi beberapa pulau kecil terdepan yakni Batek dan Dana Rote belum tersedia air tawar.
- e. Jumlah kendaraan ringan untuk pengawalan terbatas dan kendaraan Pam Matan Bergerak belum tersedia sehingga menghambat pelaksanaan operasi Pam VVIP. Selain itu, sejumlah peralatan Jihandak tidak dapat digunakan akibat pemakaian yang telah melebihi usia seperti : Handheld Explosive Detector dan Handheld Metal Detector sehingga pelaksanaan sterilisasi lebih banyak dilakukan secara manual.
- f. Kondisi asrama bagi prajurit khususnya di kesatuan Kavaleri Kodam IX/Udayana tergolong tidak layak. Bangunan dinding asrama terbuat dari tembok batako sepanjang 1 meter dan selebihnya tembok berbahan kayu. Kondisi MCK juga tidak layak. Mengingat lahan yang terbatas, maka pembuatan rumah baru dilakukan dengan cara membangun rumah "tempel" di sela-sela rumah dinas permanen yang masih kosong.
- g. Secara keseluruhan, anggaran dana untuk Kodam IX/Udayana setiap tahunnya, belum mencukupi untuk menjalankan keperluan operasional, tupoksi dan pengadaan alutsista.

3. Lanal Benoa Bali

- a. Jumlah kebutuhan personil untuk penempatan Mako maupun Posal masih kurang sehingga jabatan yang ada dalam setiap satuan kerja masih dirangkap oleh personil lainnya.
- b. Sarana dan Prasarana terbatas, antara lain:
 - 1). Dilihat dari jumlah Daftar Susunan Personil (DSP) yang ada, jumlah rumah dinas (perumahan prajurit) belum mencukupi. Adapun sarana Rumdis yang ada berjumlah 87 unit, sementara jumlah riil personil adalah 181 orang dan jumlah DSP Personel

- sebanyak 277 orang. Selain itu, tidak ada lahan/lokasi yang diperuntukkan bagi perluasan atau pembangunan rumah dinas maupun gedung perkantoran.
- 2). Jumlah kendaraan dinas (Ranmin dan Ransus) belum mencukupi dan kondisinya sudah sangat tua sehingga kurang mendukung kegiatan runitinas operasional. Selain itu, alokasi bahan bakar dan minyak pelumas (BMP) tidak memadai dibandingkan dengan itensitas kegiatan.
 - 3). Kondisi sebagian besar alat apung tidak siap digunakan untuk patroli laut baik di Posal maupun yang ada di Mako Lanal Denpasar.
 - 4). Fasilitas dinas berupa kendaraan bermotor, dukungan BBM yang ada di Posal belum memadai. Selain itu, status tanah sebagian Posal bukan hak milik Lanal Denpasar tetapi tanah pinjam dari Pelindo setempat (Posal Gilimanuk, Posal Celukan Bawang serta Syahal Benoa). Selain itu, belum ada sarana dan prasarana sandar atau dermaga.
 - 5). Lokasi kantor Lanal Benoa Denpasar yang jauh dari wilayah operasi (laut).

4. Lanud Ngurah Rai Bali

- a. Sehubungan dengan kesejahteraan prajurit, permasalahan yang muncul antara lain: terbatasnya rumah dinas, banyak mess transit yang rusak, mess bintanga/tamtama masih terbatas dan rusak, belum adanya mess wara serta fasilitas kesehatan masih minim.
- b. Belum adanya dukungan fasilitas untuk mendukung kinerja Lanud Ngurah Rai antara lain : belum ada lapangan tembak, tidak ada Paskhas, terbatasnya peralatan VVIP, gudang transit barang masih terbatas, kendaraan bermotor untuk mendukung pengamanan VVIP masih terbatas.
- c. Masih terdapat kendala terkait dengan dukungan operasi seperti belum memiliki tower antena untuk radio link dan pemasangan repeater, terbatasnya lahan yang dimiliki serta belum memiliki area parkir pesawat khusus VVIP maupun pesawat militer asing.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Komisi I DPR RI menyarankan agar Poswil BIN Provinsi Bali terus meningkatkan operasi intelijennya mengingat kondisi Bali sebagai icon internasional yang tergolong rawan terhadap berbagai tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal itu, Komisi I DPR mendukung rencana Pemprov Bali untuk menetapkan Perda bagi Pendatang yang akan mengatur antara lain persyaratan bagi pendatang untuk menetap di Bali.
2. Komisi I DPR RI akan mendukung Kodam IX/Udaya terkait dengan penambahan anggaran mengingat ketersediaan sarana prasarana/infrastruktur bidang pertahanan keamanan termasuk di wilayah perbatasan masih minim, pengadaan rumah dinas dan kebutuhan penting lainnya, dengan tujuan kinerja Kodam IX/Udayana meningkat dan dapat menjalankan tugas menjaga ketahanan nasional dan keutuhan NKRI dengan baik. Untuk itu, Komisi I DPR RI akan menyarankan kepada mitra kerja yakni Kementerian Pertahanan untuk memberikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan Kodam IX/Udayana.

3. Sehubungan dengan komitmen untuk membangun ketahanan maritim, Komisi I DPR akan memperjuangkan pengadaan sarana prasarana maritim Lanal Benoa Denpasar melalui ketersediaan anggaran yang cukup. Terkait dengan lokasi kantor Lanal yang jauh dari wilayah operasi (laut), Komisi I DPR RI akan menjajaki kemungkinan pemindahan lokasi sehingga dekat dengan wilayah operasi.
4. Komisi I DPR RI akan berupaya untuk mengalokasinya anggaran yang memadai bagi Lanud Ngurah Rai dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pertahanan, sehingga permasalahan terkait kesejahteraan prajurit, minimnya dukungan fasilitas dan operasi dapat terselesaikan dengan baik.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi I ke Provinsi Bali. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi I DPR RI dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah khususnya mitra kerja Komisi I pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2010-2011.

Jakarta, 11 November 2010
**TIM KUNKER KOMISI I DPR RI
KE PROVINSI BALI
KETUA,**

Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
A- 207

*